

BAB II

PERSOALAN PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara yang paling kurang berkembang (LDC) adalah sekelompok negara yang secara resmi diidentifikasi oleh PBB sebagai “paling tidak berkembang” dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) rendah per kapita, sumber daya manusia yang lemah dan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB menyetujui daftar LDC pertama, yang pada saat itu termasuk 24 negara. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah negara yang termasuk dalam daftar meningkat terus, mencapai 48 pada tahun 1994. Dengan populasi gabungan hampir 745 juta, atau 11,5% dari total populasi dunia, 50 LDC saat ini mewakili yang termiskin dan terlemah. segmen komunitas internasional. Kekhasan kelompok negara-negara ini terletak pada kelemahan ekonomi, kelembagaan dan sumber daya manusia mereka, yang sering diperparah oleh cacat geofisika. Distribusi regional dari negara-negara tersebut juga dapat dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan mereka (Cooperation, 2006).

Jumlah populasi dalam suatu negara harus diperhatikan terutama di negara berkembang karena jumlah populasi mempengaruhi produksi sumber daya manusia yang demikian pula dengan pelatihan dan pengalaman mereka. Permasalahan populasi pun tak lepas dari China yang mempunyai lebih dari satu miliar penduduk di negaranya. Menjadi negara pada posisi pertama populasi terbanyak di dunia membawa pengajaran tentang kewirausahaan yang berkembang dengan baik, termotivasi dan dilatih untuk mengatur sumber daya untuk

produksi yang efisien, sering hilang di negara-negara berkembang. Penyebabnya mungkin karena posisi manajerial diberikan berdasarkan status keluarga atau perlindungan politik yang dirasa pantas, mungkin karena prevalensi sikap ekonomi atau budaya yang tidak mendukung perolehan kekayaan dengan mengorganisir kegiatan produktif, atau mungkin hanya menjadi tidak adanya kuantitas atau kualitas pendidikan atau pelatihan yang diperlukan. Di dunia sekarang ini, banyak produksi yang padat pengetahuan, sehingga memberi penghargaan pada tenaga kerja yang berpendidikan. Kemampuan membaca, melakukan perhitungan dasar, mengoperasikan peralatan elektronik, dan mengikuti instruksi yang relatif rumit adalah persyaratan penting bagi banyak tenaga kerja modern. Kegagalan untuk mengembangkan keterampilan kerja yang esensial seperti itu dapat menjadi penyebab kurangnya pertumbuhan. Kesehatan yang buruk adalah sumber lain dari sumber daya manusia yang tidak memadai (America, 2005).

A. Kelebihan Populasi

Pertumbuhan populasi adalah salah satu masalah utama pembangunan ekonomi. Beberapa negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan populasi melebihi tingkat pertumbuhan PDB mereka dan karenanya memiliki tingkat pertumbuhan negatif PDB per kapita. Banyak negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan populasi yang hampir sebesar laju pertumbuhan PDB mereka. Akibatnya, standar hidup mereka hampir tidak lebih tinggi daripada 100 tahun yang lalu. Mereka telah membuat keuntungan yang cukup besar dalam pendapatan agregat, tetapi sebagian besar keuntungan telah benar-benar dimakan oleh meningkatnya populasi. Pentingnya pertumbuhan populasi untuk standar kehidupan dirasakan pada awal abad ke-19 oleh Thomas Malthus (1766-1834). Malthus menegaskan dua hubungan tentang tingkat kenaikan. Pertama, produksi makanan cenderung meningkat dalam perkembangan. Kedua, populasi

cenderung meningkat dalam perkembangan. Akibatnya, Malthus berpendapat bahwa di bawah kondisi pertumbuhan alami, populasi akan selalu cenderung lebih cepat dari pertumbuhan pasokan makanan. Hal ini diupayakan dengan metode pertanian cukup tradisional sehingga produksi pangan hanya meningkat perlahan, populasi cenderung meningkat dengan laju yang lebih cepat. Hasilnya adalah penghidupan yang hidup, dengan populasi yang dikendalikan oleh harapan hidup yang rendah dan kelaparan berkala.

Di negara berkembang, pendapatan perkapita masih cukup lemah dan dengan adanya fenomena atau pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangannya jumlah pendapatan dan populasi didalamnya. Ketidakseimbangan pendapatan dan jumlah penduduk membawa suatu persoalan baru yang harus dihadapi oleh negara berkembang yaitu kemiskinan. Kemiskinan juga terjadi akibat ketidakseimbangannya populasi dan lapangan kerja yang tersedia didalamnya.

Pertumbuhan populasi yang cepat akan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meningkatkan tingkat kesehatan anak. Bertambahnya jumlah anak-anak dan remaja menempatkan permintaan tambahan pada layanan publik, mewajibkan pemerintah untuk mengubah prioritas pengeluaran mereka atau mengurangi pengeluaran mereka per anak. Ketika negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berusaha untuk memperluas layanan pendidikan dan perawatan kesehatan, negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi akan, ceteris paribus, menghadapi tekanan terbesar. Dengan tingkat pertumbuhan populasi rata-rata 2,3% per tahun, negara-negara paling kurang berkembang perlu meningkatkan pengeluaran mereka untuk pendidikan sekitar 40% pada tahun 2030, untuk mempertahankan ukuran ruang kelas saat ini dan rasio murid-guru. Hal ini tentu menjadi tantangan baru untuk negara berkembang dengan pendapatan negara yang tidak

terlalu besar dan tuntutan yang harus menjamin kesehatan dan pendidikan warga negaranya.

Tingkat pengangguran individu terus tetap di atas tingkat pada tahun 2007, sebelum awal krisis ekonomi dan keuangan. Pengangguran dan setengah pengangguran tinggi di sejumlah negara di mana generasi muda merupakan bagian besar dari angkatan kerja. Pekerja muda seringkali tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai dan menerima upah di bawah rata-rata. Kesulitan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mencari pekerjaan juga tercermin dalam periode pencarian kerja yang lebih lama dan kualitas pekerjaan yang lebih rendah. Kesulitan-kesulitan ini diperparah oleh mereka yang kurang memiliki keterampilan yang diperlukan. Tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi dan kurangnya saluran untuk migrasi yang aman, tertib dan legal dapat mengakibatkan orang-orang muda terlibat dalam perpindahan lintas batas yang berisiko, untuk mencari peluang yang lebih baik. Lapangan pekerjaan juga harus dijamin oleh pemerintah pada negara-negara berkembang yang memiliki populasi yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Keterampilan yang sesuai dengan yang diperlukan juga dapat menjadi suatu ancaman kepada individu yang kurang dalam hal pendidikan yang kembali lagi dikarenakan oleh kurangnya kelas atau tenaga kependidikan yang seharusnya dapat dijamin oleh pemerintah untuk generasi yang akan datang (Nations, 2015).

B. Sumber Daya

Pasokan sumber daya alam suatu negara adalah hal yang penting. Negara dengan tanah tidak subur dan pasokan sumber daya alam yang tidak memadai akan menemukan pertumbuhan pendapatan yang lebih sulit untuk dicapai daripada negara yang kaya dengan sumber daya tersebut. Sebagaimana sumber daya ini dikelola juga penting. Ketika tanah pertanian dibagi menjadi banyak bidang kecil, mungkin akan jauh lebih sulit untuk

mencapai keunggulan teknik pertanian modern daripada ketika tanah tersedia dalam traktat besar untuk pertanian skala besar. Kepemilikan tanah yang terfragmentasi dapat disebabkan oleh sistem warisan atau dapat dipaksakan secara politis. Salah satu kebijakan populis setelah Revolusi Meksiko di awal abad kedua puluh adalah redistribusi tanah dari pemilik tanah besar ke petani biasa. Namun, kepemilikan tanah yang terfragmentasi mencegah pertanian Meksiko berproduksi dengan biaya yang cukup rendah untuk bersaing di pasar internasional. Pemerintah Meksiko sekarang menghadapi pilihan yang menyakitkan antara membiarkan reformasi tanah populisnya dibalikkan atau terus melindungi sektor pertanian besar yang inefisiensinya meningkat relatif terhadap pemasok yang bersaing. Meskipun pasokan sumber daya alam yang melimpah dapat membantu pertumbuhan, mereka tidak cukup untuk memastikan pertumbuhan atau diperlukan untuk itu. Beberapa negara dengan persediaan sumber daya alam yang besar memiliki kinerja pertumbuhan yang buruk karena struktur ekonomi yang mendorong pemborosan atau pengeluaran untuk mengupayakan pembangunan. Contoh utama adalah bekas Uni Soviet, Argentina sebelum 1990-an, dan Uganda. Sebaliknya, negara-negara lain telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat berdasarkan pada sumber daya manusia dan kemampuan wirausaha meskipun kurangnya sumber daya alam. Contoh utama adalah Swiss pada abad-abad sebelumnya, Jepang selama 100 tahun terakhir (sampai malaise ekonomi signifikan saat ini, dimulai pada awal 1990-an), dan Singapura, Hong Kong, dan Taiwan sejak akhir Perang Dunia Kedua (America, 2005).

C. Beban Hutang Luar Negeri

Masalah lain yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang adalah hutang luar negeri ada tahun 1970 dan awal 1980 banyak disaksikan pertumbuhan luar biasa dalam utang luar negeri banyak negara berkembang. Sejak pertengahan

1980-an, sebagian besar negara-negara berkembang telah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran yang diperlukan untuk membayar hutang mereka. “Penjadwalan Utang” ditunda hingga pembayaran di masa depan yang tidak dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan merupakan fenomena umum. Kepopuleran peningkatan utang dinyatakan ketika OPEC meningkatkan harga minyak dunia empat kali lipat pada tahun 1973. Karena banyak negara berkembang bergantung pada minyak impor, neraca perdagangan mereka bergerak tajam ke defisit. Pada saat yang sama, negara-negara OPEC mengembangkan surplus perdagangan besar-besaran. Bank-bank komersial membantu mendaur ulang simpanan para pelanggan OPEC mereka memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. Pinjaman ini membiayai beberapa penyesuaian yang diperlukan dan beberapa proyek investasi baru yang bermanfaat. Namun, sebagian besar dana digunakan secara tidak bijaksana; pengeluaran pemerintah yang boros dan pembelanjaan mewah terjadi di banyak negara peminjam. Peningkatan harga energi pada tahun 1979 menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam hutang negara-negara berkembang yang mengimpor minyak. Resesi dunia yang parah yang dimulai pada 1981 mengurangi permintaan ekspor banyak negara ini. Akibatnya, negara-negara berkembang tidak dapat mencapai banyak manfaat dari penyesuaian dan pengeluaran investasi yang telah dibuat. Lebih jauh lagi, kenaikan tajam dalam tingkat bunga riil (sebagian disebabkan oleh perang luas melawan inflasi) menyebabkan peningkatan pembayaran utang. Akibatnya, banyak negara tidak dapat melakukan pembayaran. Bank-bank pemberi pinjaman tidak punya banyak pilihan selain menjadwalkan ulang hutang yang pada dasarnya meminjamkan uang kepada negara-negara berkembang untuk melakukan pembayaran bunga sambil menambah pokok pinjaman yang ada. Dana Moneter Internasional (IMF) memainkan peran sentral dalam mengatur penjadwalan ulang ini dengan membuat pinjaman lebih lanjut dan konsesi bersyarat (America, 2005).

Harus dikemukakan bahwa dalam seluruh periode pasca perang, harga barang-barang industri meningkat jauh lebih cepat daripada harga bahan baku dan komoditas pertanian. Dalam praktiknya, fenomena itu berarti kerugian bagi negara-negara berkembang yang sama-sama penghasil dan pengekspor komoditas pertanian dan sumber daya alam, sementara itu juga menghubungkan keuntungan bagi negara-negara maju yang merupakan penghasil dan pengekspor barang-barang olahan. Kumpulan data komprehensif utang negara berkembang dikumpulkan oleh Bank Dunia, dalam Statistik Utang Internasionalnya, data Bank Dunia menunjukkan bahwa utang luar negeri negara berpenghasilan rendah dan menengah telah meningkat secara terus menerus selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2000, tahun di mana MDGs mulai diimplementasikan, negara-negara berkembang harus melakukan beban utang luar negeri sebesar US \$ 1,8 triliun. Jumlah ini melonjak menjadi US \$ 5,4 triliun pada tahun 2014. Dengan demikian, SDG sedang dilaksanakan pada titik ketika beban eksternal negara-negara berkembang telah bertumbuh sebanyak tiga kali lipat. Sekitar setengah dari jumlah ini sekarang terutang oleh debitor swasta di negara-negara berkembang. Seperti negara berkembang lainnya, China pun mempunyai utang luar negeri untuk membiayai berbagai keperluan negaranya. Menurut *State Administration of Foreign Exchange (SAFE)* pada akhir 2018 utang China mencapai US \$ 1,9652 triliun yang berarti meningkat sebanyak US \$ 207,3 miliar atau 12% dibandingkan dengan akhir 2017 (CBN, 2019).

Situasi negara berkembang dengan status sebagai debitur memiliki karakter tertentu. Karena itu, tidak semua dapat disebutkan faktor apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya utang luar negeri. Alasan yang paling mendasar untuk mengambil pinjaman eksternal tidak diragukan lagi adalah kekurangan modal sendiri dan aspirasi yang terkait dengan pengembangan, konsumsi dan ekspansi. Alasan untuk berutang yaitu karena bergantung pada tingkat perkembangan suatu negara. Terlepas dari perbedaan ragam dari alasan adanya hutang luar negeri, beberapa penyebab umum, yang khas dari

negara-negara berkembang, dapat dibedakan. Memulai klasifikasi yang paling umum, sumber-sumber utang luar negeri internal (tergantung pada negara debitor) dan eksternal (independen dari negara debitor) harus dipisahkan.

Sangat mudah untuk mengemukakan bahwa negara-negara berkembang tidak dapat mengakumulasi cukup banyak dari kemampuan mereka sendiri untuk merealisasikan investasi pembangunan yang diperlukan dan dengan demikian, mereka mengambil keuntungan dari cara eksternal. Diasumsikan bahwa cara eksternal hanya saling melengkapi dengan cara internal. Pada kenyataannya, relatif sering terbukti bahwa fenomena pembiayaan yang berlebihan menggunakan sarana eksternal terjadi, yang berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri. Sebagai contoh, beberapa negara minyak menganggap penurunan keuntungan yang diperoleh dari ekspor minyak sebagai yang terkenal sementara dan terus berinvestasi secara intensif. Serangkaian program investasi terkait dengan infrastruktur ekonomi yaitu: transportasi, energik dan sarana komunikasi, yang sifatnya sendiri ditandai dengan periode pengembalian yang lama dan sering diprogram secara tidak tepat dan itulah sebabnya mereka menuntut lebih banyak pengeluaran uang dari yang diperkirakan sebelumnya.

Ekonomi negara-negara berkembang telah tumbuh secara substansial selama 15 tahun terakhir, dan demikian pula kapasitas mereka untuk mempertahankan tingkat utang yang lebih tinggi. Sementara stok utang luar negeri adalah 34,6% dari GNI pada tahun 2000 (dan 122,5% dari pendapatan ekspor), ini turun menjadi 19,8% pada tahun 2011 (atau masing-masing 67,0% dari ekspor). Perbaikan ini dimungkinkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dan juga oleh inisiatif pengurangan utang yang menguntungkan banyak negara. Namun, tahun 2011 adalah tahun penyelesaian, ketika indikator peminjaman mengubah lintasan mereka dari menjadi lebih baik ke lebih buruk. Sejak itu, utang negara berkembang telah berada pada lintasan ke atas yang berkelanjutan lagi, juga ketika diukur dari segi kekuatan ekonomi. Tingkat utang sudah

mencapai 22,2% dari GNI dan 79,1% dari pendapatan ekspor pada tahun 2014 (Ellmers, 2016).

Faktor lain yang menyebabkan adanya pinjaman luar negeri adalah bahwa mata uang negara berkembang telah terdepresiasi dibandingkan dengan dolar AS. Bahkan beban hutang dolar AS yang konstan menjadi lebih berat ketika nilai dolar meningkat. Hal ini menciptakan dilema kebijakan. Negara-negara berkembang dapat mencoba membuat industri ekspor mereka lebih kompetitif dengan mendevalusi mata uang mereka, tetapi ini juga akan menambah beban utang luar negeri. Opsi untuk menyelesaikan masalah utang melalui pertumbuhan yang dipimpin ekspor karenanya bukanlah pilihan yang layak untuk banyak negara. Utang luar negeri perlu dikurangi untuk memungkinkan siklus pertumbuhan baru dan peningkatan ekonomi.

Keberlanjutan utang yang terjadi dipahami sebagai risiko gagal bayar debitur tidak terlalu tergantung pada indikator obyektif seperti rasio utang terhadap GNI atau rasio utang terhadap ekspor. Wanprestasi biasanya terjadi ketika debitur tidak mungkin melakukan *rollover* stok utang yang ada, ketika menjadi tidak mungkin menemukan kreditor baru yang bersedia meminjamkan dan membiayai kembali hutang lama yang jatuh tempo. Perlambatan dalam pemberian pinjaman baru mungkin menyiratkan, di sisi lain, bahwa akses ke kredit menjadi lebih sulit bagi negara-negara berkembang. Krisis kredit pada tingkat hutang yang tinggi ini akan membuat restrukturisasi hutang yang substansial diperlukan di sejumlah besar negara berkembang (Ellmers, 2016).

